

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

Peneliti yang membahas permasalahan mengenai faktor kemenangan koalisi pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada pemilukada cukup banyak ditemui dalam jurnal-jurnal politik. Penelitian pada umumnya sebagian besar membahas hal-hal yang terkait strategi yang digunakan oleh pasangan calon kepala daerah, hasil pemilu kepala daerah, konflik yang terjadi saat pelaksanaan pemilu kepala daerah, serta dampak pelaksanaan pemilukada.

Penelitian mengenai faktor kemenangan koalisi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilu kepala daerah di Kabupaten Bantul, diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk menentukan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemenangan koalisi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemilukada di daerah-daerah lainnya. Dalam

penelitian yang dilaksanakan oleh Fitriyah, Hermi, Susiatianingsih dan Supratiwi menjelaskan Faktor Determinan dari kemenangan kandidat pada Pemilu Kabupat Batang 2011.

Penelitian ini diawali dengan penjabaran tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Batang dalam menggunakan hak pilihnya tergolong tinggi dan konsisten yakni di atas 75%, antusias pemilih ini terutama terjadi pada pemilu yang cenderung tinggi dibanding pemilu lainnya. Selain itu keputusan masyarakat dalam menentukan pilihan didasari oleh pilihannya sendiri, bukan dari pihak luar ataupun lingkungan, hanya sebagian kecil masyarakat yang masih terpengaruh lingkungan seperti teman, keluarga maupun tetangga.

Faktor figur dan ketokohan memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan memilih. Faktor sosiologis, faktor ekonomi, dan faktor psikologis juga berpengaruh dalam menentukan pilihan masyarakat, namun ketiga faktor tersebut tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap keputusan memilih. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa politik uang adalah hal yang wajar dalam pemilu dan pada prakteknya semua calon menenebar uang, hanya sebagian kecil saja masyarakat menolak adanya politik uang. Kondisi seperti ini ternyata bukan menjadi faktor utama sebagai pertimbangan dalam memilih seorang calon.

Sofyan A Jusuf, Mashuri Maschab (2007) dalam tesisnya yang berjudul Studi tentang strategi politik pasangan Bandjela Paliudju dan Achmad yahya dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Gubernur Sulawesi tengah tahun 2006 dapat mengungkapkan bahwa kemenangan yang diraih oleh pasangan tersebut mutlak sepenuhnya terjadi karena adanya strategi politik yang dibentuk dan diterapkan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yakni strategi memperluas dukungan partai politik dan konsituennya, strategi pencitraan figur politik, serta strategi kampanye.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa point bagi setiap kandidat yang hendak bertarung yakni, diawali dengan perlunya dibangun dukungan konstituen partai yang lebih solid dan terkoordinasi baik pelaksanaannya di tingkat koalisi maupun dalam struktur partai serta pelaksanaannya di tingkat konstituen partai koalisi yang mengusung pasangan calon. Perlunya mengefektifkan mesin partai koalisi yang berkolaborasi dengan tim sukses pasangan calon agar menghindari adanya kader yang menyimpang dari koalisi dan memperkuat dukungan.

Point selanjutnya yakni pembentukan (citra politik) pasangan calon harus lebih kongkrit, menunjukkan pasangan tersebut mampu memimpin melalui program kerja yang terarah. Pelaksanaan kampanye juga harus melibatkan komponen masyarakat. Dalam pengelolaan isu-isu politik hendaknya memperhatikan strategi pemerataan pembangunan antar daerah, lintas budaya, etnis, dan agama, guna memperluas dukungan yang di

dapat dan mengangkat citra figur calon, sehingga semua pihak merasa diayomi dan diperhatikan.

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan diatas, terdapat persamaan dalam pembahasan mengenai kemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilukada, namun yang menjadi perbedaan penelitian pada pemilukada di Kabupaten Bantul tahun 2015 ini dengan penelitian yang sebelumnya ialah lebih spesifikasi pada pembahasan faktor kemenangan koalisi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemenangan pemilukada Kabupaten Bantul.

**Tabel 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Penelitian (tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil</b>
1	Fitriyah, Hermini Susiatianingsih dan Supratiwi	<i>Faktor Determinan Kemenangan Kandidat Pada Pemilukada Kabupaten Batang 2011</i>	Faktor determinan kemenangan kandidat antara lain : (1) Tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya tinggi, (2) Keputusan memilih pemilih di Kabupaten Batang di dasari oleh pilihan pribadi, (3) Faktor figur dan ketokohan memainkan peran penting dalam membuat keputusan memilih, (4) Figur calon pasangan sangat signifikan berpengaruh terhadap hasil suara, dan (5) Faktor sosiologis dan psikologis juga berperan namun tidak secara signifikan
2	Sofyan A Jusuf, Mashuri Maschab (2007)	<i>Studi tentang strategi politik pasangan Bandjela Paliudju dan Achmad yahya dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Gubernur Sulawesi tengah tahun 2006</i>	Hasil kemenangan pemilukada di Sulawesi tengah tahun 2006 tersebut sepenuhnya disebabkan karena adanya strategi politik yang dirancang dan diterapkan oleh pasangan calon yakni strategi memperluas dukungan partai politik dan konsituennya, strategi pencitraan figur politik, serta strategi kampanye.
3	Susilo Utomo (2013)	<i>Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Memenangkan Pasangan Ganjar Pranowo – Heru Sudjatmoko Pada Pilgub Jateng 2013</i>	Peran PDIP dalam pemenangan pasangan Ganjar Pranowo – Heru sudjatmoko memiliki tingkatan yang kuat yakni sebagai perekrut politik, mesin pengumpul suara dan sebagai penggerak basis massa atau mobilisasi massa.
4	Muchammad Ichsan Saputra, Bambang Santoso Haryono, Mochammad Rozikin (2013)	<i>Marketing Politik Pasangan Kepala Daerah dalam Pemilukada (Studi Kasus Tim Sukses Pemenangan Pasangan Abah Anton dan Sutiaji dalam Pemilukada Kota Malang 2013)</i>	Marketing politik yang telah dilaksanakan oleh tim sukses dalam pemenangan pasangan Abah Anton dan Sutiaji, yaitu pembentukan figure dan program-program kampanye yang kompleks mencakup dari penentuan produk politik, <i>promotion, place, price</i> , dan segmentasi pemilih.

5	Nehemia Syalom Ginting (2013)	<i>Marketing Politik dalam Pemilukada Kabupaten Karo tahun 2010</i>	Keberhasilan strategi politik yang diterapkan oleh tim pemenangan pasangan Kena Ukur Surbakti – Terkelin Brahmana antara lain : (1) Tim pemenangan pasangan ini memperkuat basis marketing politik kedaerah mayoritas adalah pemilih tradisional yakni daerah pedesaan. (2) Tim pemenangan pasangan ini menonjolkan etnitas sebagai isu utama untuk menarik dukungan dari masyarakat
---	-------------------------------	---	--

## 2.2. Kerangka Teori

Kerangka teori diharapkan menjadi sebuah acuan secara konsep yang nantinya dapat digunakan dalam memandang, menilai dan menganalisis sebuah permasalahan. Teori yang nantinya digunakan dalam penelitian ini ialah teori Koalisi Partai Politik, teori Partisipasi Politik dan teori Modal Sosial. Teori yang dipaparkan tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisa permasalahan yang dibahas oleh peneliti.

Teori Koalisi Partai Politik digunakan untuk menganalisis bentuk koalisi yang diusung oleh pasangan Suharsono-Halim dalam pemenangan pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015. Teori Partisipasi Politik ini sendiri digunakan untuk menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam

pemilukada di Kabupaten Bantul dalam kemenangan pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015.

Serta teori Modal Politik digunakan untuk mengetahui dan menganalisis variabel apa saja dari modal politik yang dimiliki oleh pasangan Suharsono-Halim dalam kemenangan pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015.

### **2.2.1. Koalisi Partai Politik**

Teori koalisi partai telah lama berkembang di negara-negara yang menggunakan sistem parlementer. Menurut Arend (1995:221) Koalisi partai politik dapat dimaknai dengan upaya penggabungan kelompok individu yang saling berinteraksi dan sengaja dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi kepada isu atau masalah, memfokuskan pada tujuan diluar koalisi, serta memerlukan aksi bersama para anggota.

Dalam ranah politik, koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih yang memiliki tujuan untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan. Pada negara yang

menggunakan sistem pemerintahan presidensial yang multi partai, Bambang Cipto (2000:22) mendeskripsikan definisi koalisi yakni suatu keniscayaan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Hakikat sebuah koalisi ialah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (*strong*), mandiri (*autonomus*), dan tahan lama (*durable*).

Pemerintahan yang kuat bisa diartikan sebagai pemerintahan yang mampu menciptakan dan mengimplementasikan kebijakannya tanpa khawatir mendapat penolakan atau perlawanan di parlemen. Sampai saat ini koalisi yang tercipta antara partai politik tidak ada yang ideal, tidak ada satupun koalisi yang digalang para elit menghasilkan paduan yang sesuai dengan hakikatnya.

Bentuk koalisi yang sering ditemui ialah koalisi yang membingungkan, secara kompleks kekuatan politik, aktor dan ideologi menjadi faktor yang menyulitkan. Secara teoritis koalisi partai hanya akan berjalan bila dibangun diatas landasan pemikiran yang realistis dan layak.

## **1. Jenis-Jenis Koalisi**

Efriza (2012) dalam bukunya yang berjudul *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik* dan mengacu pada teori Arend Lijphart mengemukakan dengan jelas beberapa bentuk koalisi berdasarkan jenisnya, antara lain :

### **a. Koalisi Berbasis Ideologi**

Teori koalisi berbasis ideologi berfokus pada pentingnya kesamaan ideologi dan kebijakan partai sebagai pertimbangan dalam membentuk koalisi. Ambardi dalam de Swan (1973) menjelaskan bahwa teori ini menyatakan bahwa para politikus umumnya ingin meninggalkan jejak ideologi dan kebijakan partai di pemerintahan.

Politikus ini tidak menjadikan jabatan kabinet sebagai tujuan akhir, melainkan sekedar sarana untuk menerapkan kebijakan tertentu. Karena memilih dan mempertahankan kebijakan terbaik menjadi dorongan utama, maka pertalian ideologis menjadi dasar

pembentukan koalisi. Oleh Karena itu, besar kecilnya koalisi tidak menjadi kriteria utama dalam merangkul atau mengesampingkan satu partai. Hal yang paling penting ialah koalisi tersebut berusaha membentuk pemerintahan yang kompak (ambardi dalam Gallagher, Laver, Mair 1995:305). Dalam konteks ini, partai politik berfungsi sebagai sabuk transisi.

**b. Koalisi Kemenangan Minimal (*miminal-winning coalition*)**

Teori ini menyatakan prinsip dasar koalisi berada pada maksimalisasi kekuasaan dan meraih jabatan pemerintahan sebanyak mungkin. Teori kemenangan minimal ini beranggapan bahwa duduk di pemerintahan merupakan tujuan pokok partai karena akan memberi peserta koalisi keuntungan dari segi politik dan material.

Hal ini dilakukan dengan cara mencari sebanyak mungkin partai politik yang memperoleh kursi di kabinet untuk bergabung dan mengabaikan partai-

partai yang tidak perlu untuk diajak berkoalisi. Dalam teori ini partai-partai bergabung membentuk koalisi dengan menghitung kemungkinan kemenangan suara terbanyak, yakni  $50\% + 1$ . Biasanya peserta koalisi akan berhenti menjadi rekan baru ketika perolehan kursi parlemen 50 persen telah terlampaui.

Kondisi ini dikemukakan oleh Ambardi dalam Riker (1962:33) yang menjelaskan bahwa peserta koalisi akan membentuk koalisi seminimal mungkin asal menjamin kemenangan dalam persaingan, dan tidak akan menambah peserta lagi. Dengan demikian keuntungan politik yang didapat dapat di distribusikan secara maksimal kepada peserta koalisi. Secara singkat peserta koalisi hanya berfokus pada suara yang dibutuhkan guna memenangkan pertarungan politik.

### **c. Minimal Range Coalition**

Dasar dari pelaksanaan koalisi ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis untuk

memudahkan partai-partai dalam berkoalisi dan membentuk kabinet dalam sebuah pemerintahan.

#### **d. Minimum Size Coalition**

Koalisi ini merupakan Partai dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk bergabung demi sekadar mencapai suara mayoritas.

#### **e. Bargaining Proposition**

Merupakan koalisi dengan jumlah anggota partai paling sedikit untuk memudahkan proses negosiasi dalam pemerintahan dan dalam pembentukan kebijakan. Dasar dari teori ini dilaksanakan adalah untuk memudahkan proses tawar-menawar dan negosiasi karena anggota atau rekanan koalisi hanya sedikit.

## **2. Cara Terbentuknya Koalisi**

Menurut Evriza (2012), suatu koalisi dapat terbentuk melalui beberapa cara, yakni :

- a. Bermula dengan satu pendiri (*founder*).
- b. Mencapai massa kritis (*critical mass*).

- c. Mengajak yang paling lemah untuk mendukung (*weak ties can be strong*).
- d. Membentuk diam-diam dan membubarkan secepatnya

### **2.2.2. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi. Huntington dalam Rahman (2007:285), mengemukakan definisi dari partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik, seperti memilih seorang pemimpin atau upaya-upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Peter L.Berger (1976:60) dalam bukunya *Pyramids of Sacrifice : Political Ethnics and Social Change* mengemukakan bahwa asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya ialah orang itu sendiri. Hal ini didasari oleh keputusan politik yang dibentuk tersebut sudah pasti akan berhubungan dan mempengaruhi

kehidupan warga masyarakat, sehingga warga masyarakat berhak ikut serta dalam menentukan keputusan politik.

Oleh karena itu Partisipasi dalam arti sederhana adalah keikutsertaan atau keterlibatan seseorang atau kelompok didalam suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan ikut bertanggung jawab agar turut menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut Ishomuddin (2001:165). Berdasarkan penjelasan diatas, kegiatan tersebut antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan sebuah kebijakan, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam sebuah pemilihan umum.

Semakin hari masyarakat berkembang menjadi sangat kritis dan selalu mengevaluasi apa saja hasil yang telah diraih oleh pasangan yang memenankan pemilu. Apabila program kerja yang diusung pasangan tidak terlaksana dan tidak sesuai dengan janji saat kampanye pemilu,

masyarakat akan menentukan keputusan untuk tidak memilihnya kembali pada pemilu tahun berikutnya.

### **1. Tipologi Partisipasi Politik**

Rahman (2007:288) dalam bukunya Sistem Politik Indonesia, membagi partisipasi politik sebagai kegiatan menjadi tiga jenis, yakni:

- a. Partisipasi aktif** yakni kegiatan untuk mengajukan usul mengenai suatu kebijakan, mengajukan kritik terhadap suatu kebijakan yang ada, membayar pajak dan ikut serta dalam memilih pemimpin atau pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi dapat berorientasi pada proses *input* dan *output*.
- b. Partisipasi pasif** yaitu, kegiatan berupa sikap yang menaati pemerintahan, menerima dan melaksanakan apa saja yang diputuskan oleh pemerintah, serta hanya berorientasi pada output.
- c. Golongan Putih (Golput)** atau kelompok apatis, golongan ini menganggap sistem politik yang ada saat

ini telah jauh bergeser dari apa yang sebelumnya sudah dicita-citakan.

Sedangkan menurut Milbarth dan Goel (1997) partisipasi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yakni :

- a. **Kelompok Apatis**, anggota dari kelompok ini ialah orang yang tidak akan berpartisipasi dan cenderung menarik diri dari kegiatan politik.
- b. **Spektator**, kelompok ini setidaknya pernah memberikan haknya untuk memilih dalam pemilihan umum.
- c. **Gladiator**, anggota kelompok ini terdiri dari mereka yang secara aktif mengikuti kegiatan politik seperti aktivis partai, aktivis masyarakat, komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, serta pekerja kampanye.
- d. **Pengeritik**, kelompok ini mengikuti kegiatan politik namun tidak dalam bentuk partisipasi konvensional.

Olsen (1997) memandang partisipasi politik sebagai sudut pandang utama stratifikasi sosial. Partisipasi politik dibagi menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator (orang yang bertugas menyampaikan dan menerima ide-ide, perilaku dan informasi politik lain kepada orang lain), warga negara, kelompok marginal (kelompok yang sangat sedikit melakukan aktivitas sistem politik), dan masyarakat terisolasi (masyarakat yang jarang melakukan kontak dengan sistem politik).

## **2. Model Partisipasi Politik**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam dalam proses politik ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Berdasarkan tinggi rendahnya kedua faktor tersebut, Paige (1971:810-820) membagi partisipasi menjadi empat tipe. Adapun tipe tersebut antara lain :

- a. **Partisipasi Cenderung Aktif** merupakan kondisi yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi.
- b. **Partisipasi Cenderung Pasif - Apatis (tertekan)** merupakan kondisi dimana seseorang atau masyarakat yang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah.
- c. **Militan Radikal**, yakni kondisi yang dimiliki seseorang atau masyarakat apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah.
- d. **Partisipasi Tidak Aktif (pasif)**, kondisi ini terjadi apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi.

Kedua faktor diatas tidaklah berdiri sendiri (variabel independent) melainkan dipengaruhi pula oleh faktor lain seperti status sosial (kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan),

status ekonomi yakni kedudukan seseorang berdasarkan kepemilikan kekayaan, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.

Hubungan faktor-faktor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut, dimana status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi dikelompokkan sebagai variabel pengaruh atau variabel independent. Kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah dikategorikan sebagai *intervening variabel*. Sedangkan partisipasi politik dikategorikan sebagai variabel terpengaruh atau variabel dependen.

### **3. Perilaku Memilih**

Kerikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan guna membuat keputusan apakah turut serta dalam pemilihan umum atau tidak. Menurut Surbakti (2010:186) ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk menganalisis alasan dasar yang digunakan masyarakat dalam memilih seseorang, yakni :

### **a. Struktural**

Pendekatan ini melihat kegiatan memilih sebagai bagian dari konteks struktur yang lebih luas seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemerintahan umum, permasalahan, dan program yang ditonjolkan setiap partai. Struktur sosial yang menjadi kemajemukan politik tersebut berupa perbedaan agama, bahasa dan nasionalisme, basis sosial sistem partai, jumlah partai, dan program-program yang ditonjolkan karena perbedaan struktur sosial tersebut.

### **b. Sosiologis**

Pendekatan sosiologis lebih menempatkan kegiatan memilih dalam kegiatan konteks sosial. Model sosiologis ini tidak akan mengembangkan ikatan psikologis dengan partai politik yang melandaskan para pengaruh keluarga, melainkan lebih fokus pada pengaruh dari keseimbangan sosial, yang mencerminkan berbagai permasalahan perpecahan dan ketegangan di lingkungan masyarakat.

Pada sadarnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi. Kondisi tersebut antara lain jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas dan pendapatan serta agama. Pada model ini penjelasan yang berhubungan dengan sosial dapat diterima dengan akal sejauh kepentingan-kepentingan kelompok data membentuk kesetiaan partai politik.

**c. Ekologis**

Pendekatan ini hanya relevan apabila dalam sebuah daerah pemilihan memiliki perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Kelompok masyarakat seperti tipe penganut agama tertentu, buruh, kelas menengah, mahasiswa, suku tertentu, dan profesi tertentu yang bertempat tinggal pada unit teritorial sehingga perubahan komposisi penduduk yang tinggal di unit teritorial dapat dijadikan sebagai penjelasan atas perubahan hasil pemilihan umum.

Pendekatan ekologis ini penting sekali digunakan karena karakteristik data hasil pemilu untuk masing-masing tingkat berbeda. Seperti hasil pemilu di provinsi berbeda dengan karakteristik data di kabupaten, atau karakteristik data di kabupaten berbeda dengan yang ada di kecamatan.

#### **d. Psikologis sosial**

Salah satu konsep yang digunakan ialah identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Dengan kata lain, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor lain.

#### **e. Pilihan Rasional**

Pendekatan rasional ini melihat kegiatan memilih sebagai kalkulasi untung dan rugi, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa para pemilih secara individu

menentukan partai pilihan mereka berdasarkan kepentingan pribadi personal.

Adapun hal yang menjadi pertimbangan ialah bukan hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan melainkan pertimbangan dari segi untung dan rugi yang digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang akan dipilih, terutama digunakan untuk menentukan keputusan apakah akan ikut memilih atau tidak. Akan tetapi kondisi ini digunakan oleh pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah.

Dalam proses memahami bagaimana pilihan rasional akan mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih, Williams dalam Ishiyama dan Breuning (2013:1310) menjelaskan bahwa diperlukan sebuah kajian yang lebih mendalam pada model pilihan Rasional ini. Pilihan rasional berasumsi bahwa individu

memiliki informasi secara lengkap tentang biaya dan manfaat mereka memberikan pilihan.

Penentuan sikap untuk memilih mengharuskan seseorang mengetahui terlebih dulu biaya dan manfaat dari pemberian pilihan, hal ini dilakukan untuk membuat perbedaan yang mendasari pilihannya. Biaya tersebut sangat bervariasi jenisnya, ada biaya yang dikhususkan untuk pemilih itu sendiri seperti uang transportasi untuk menuju ke lokasi pemilihan, ataupun uang pengganti karena mengorbankan waktu kerja dengan meninggalkan pekerjaan yang sedang dijalani, maupun meninggalkan waktu untuk aktivitas lainnya demi mengikuti proses pemilihan umum.

### **2.2.3. Modalitas**

Piere Bourdieu (1986) membagi modal dalam empat bentuk, yakni modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik, bentuk ini di deskripsikan dalam bukunya *The Forms of Capital*, namun dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada modal politik, modal

sosial dan modal budaya. Menurutnya definisi dari modal itu sangat luas dan mencakup hal-hal yang bersifat material (dapat memiliki nilai yang simbolik), serta modal budaya (yang dikategorikan sebagai minat bernilai budaya dan pola-pola konsumsi).

Menurut Bourdieu modal memiliki peran sebagai relasi sosial yang berada di dalam sebuah sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang baik berupa materiil ataupun berupa simbol, modal mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk di cari dalam sebuah formasi sosial tertentu. Bourdieu juga menyatakan memandang modal sebagai basis dari dominasi, cukup banyak jenis modal yang dapat ditukar dengan jenis-jenis modal lainnya, hal ini menjelaskan bahwa artian modal memiliki sifat dapat ditukar.

Penukaran paling hebat yang telah berhasil dilakukan adalah penukaran pada modal simbolik, sebab dalam bentuk inilah modal yang berbeda dapat dipersepsikan dan dikenali sebagai sesuatu yang dianggap sah (legitimate).

Agar dipandang sebagai seseorang atau kelas yang berstatus, dan mempunyai nilai lebih (*prestise*), berarti ia harus diterima sebagai sesuatu yang dianggap sah (*legitimate*).

Dalam proses pelaksanaan pemilukada, kandidat yang kemungkinan akan memenangkan pemilukada jikalau ia memiliki modalitas yang terbangun. Modal utama yang harus dimiliki oleh kandidat yang ingin maju ialah modal politik, modal sosial dan modal ekonomi. Pasangan calon kepala daerah akan berpeluang besar memenangkan dan terpilih apabila memiliki akumulasi lebih dari satu modal, asumsinya semakin besar pasangan calon mampu mengakumulasi ketiga modal itu, maka semakin besar peluang untuk terpilih sebagai kepala daerah.

Berikut akan dijelaskan beberapa tipe modal utama yang harus dimiliki kandidat yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada Pemilukada langsung, modalitas tersebut yakni :

## **1. Modal Politik**

Definisi dari modal politik dalam kajian ilmu sosial jauh lebih sedikit dibanding publikasi model jenis lainnya, yakni modal simbolik (*symbolic capital*), modal sosial (*social capital*), modal budaya (*cultural capital*) maupun modal ekonomi (*economy capital*).

Dalam pemilukada pasangan calon memerlukan dukungan politik yang didapat dari partai politik. Partai politik merupakan organisasi politik yang dapat mengajukan seorang kandidat dalam pemilukada untuk menempati posisi politik di pemerintahan dan kemudian di pilih oleh masyarakat. Pemilihan umum sendiri merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menentukan orang-orang yang nantinya akan mewakili rakyat dalam pemerintahan.

Pasangan calon akan berusaha mencari sebanyak mungkin koalisi partai politik untuk dapat mengusungnya di pemilukada, baik yang memperoleh kursi di DPRD dari hasil pemilukada maupun yang tidak memiliki kursi.

Dalam kondisi ini fungsi dari partai politik sebagai alat mobilisasi dukungan tergolong kecil sehingga pasangan yang ingin memenangkan suaranya haruslah tetap memanfaatkan jaringan organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik, karena pengaruh figur kandidat akan menjadi fokus utama dalam kompetisi di pemilukada.

Menurut A. Hick dan J. Misra (1993) ia menyampaikan bahwa modal politik merupakan fokus pemberian kekuasaan/sumber daya untuk dapat merealisasikan hal-hal yang dapat membantu mewujudkan kepentingan. Jadi pada intinya, modal politik merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, kekuasaan tersebut bisa dioperasikan atau dapat berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum.

Casey dalam Sudirman Nasir (2009) menjelaskan bahwa definisi modal politik digunakan untuk pendayagunaan keseluruhan modal yang dimiliki oleh

seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik guna menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan dan dapat memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan.

Casey mengemukakan adanya empat dimensi politik yang dapat berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik. Dimensi pertama ialah pemilu, karena pemilu merupakan instrumen dasar untuk memilih pemimpin dalam sistem demokrasi, dimensi kedua ialah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik.

Dimensi ketiga ialah dinamika hubungan dan konflik yang terjadi antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik, serta dimensi politik keempat ialah pendapat atau pandangan umum (*public opinion*) terkait pelaku politik atau lembaga politik tersebut.

Modal simbolik dalam hubungannya dengan dinamika politik dapat dimaknai sebagai besaran

legitimasi, reputasi, dan tingkat penghormatan (*respect*) yang didapatkan oleh pelaku-politik maupun lembaga politik, sebagai akibat dari tindakan politik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan olehnya.

Pemilihan umum digunakan untuk melaksanakan sirkulasi elit dalam mengisi jabatan politik dalam sebuah pemerintahan. Elit dalam sebuah politik harus memiliki keunggulan tersendiri, prosentase kemenangan pasangan kandidat yang di dasari oleh besar atau dominannya suara partai politik tidak menjamin ia akan memenangkan pilkada secara langsung. Kondisi ini dikarenakan figur pasangan lebih kuat dibandingkan dengan koalisi partai politik pendukung.

Selain dukungan dari partai politik, Haryanto (2005) mengemukakan bahwa seorang pasangan calon juga harus berusaha sebanyak mungkin memperoleh dukungan dari elit politik lokal, serta kekuatan-kekuatan non politik, seperti organisasi keagamaan, organisasi pemuda dan lainnya.

## **2. Modal Sosial**

Modal sosial merupakan sumberdaya sosial yang bisa digunakan sebagai investasi untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan bersama didalam kelompok. Dalam buku *The Form of Capital*, Pierre Bourdieu (1986) mengemukakan definisi dari modal sosial merupakan sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang, dimana berasal dari jaringan sosial yang terlembaga.

Kondisi ini terjadi secara terus-menerus berbentuk pengakuan keanggotaan dalam sebuah kelompok sosial yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan yang bersifat kolektif. Bourdieu juga menegaskan tentang modal sosial sebagai sesuatu yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya baik dari segi ekonomi, budaya maupun bentuk modal sosial lainnya berupa institusi lokal maupun kekayaan sumber daya alamnya.

Sumberdaya sosial tersebut dapat dikategorikan seperti tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di lingkungan masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, organisasi pemuda, profesi dan sebagainya). Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan pemenangan pemilukada, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat kandidat harus memiliki pengaruh tersebut.

Nurhasim (2003:8) menjelaskan bahwa latar belakang sosial tersebut merupakan modal sosial yang harus dimiliki oleh pasangan calon guna membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat, dimana kekuasaan juga dapat diperoleh dengan adanya kepercayaan.

Kepercayaan digunakan untuk memperoleh kekuasaan atau kedudukan, kepercayaan diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang memang dapat dipercaya, dengan membawa kepercayaan dari masyarakat. Apabila kekuasaan yang sudah diberikan di

langgar, maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemegang kekuasaan sudah hilang.

Fitriyah (2011:4) mengemukakan bahwa modal sosial merupakan syarat yang harus dilaksanakan bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik dan stabilitas dalam demokrasi. Apabila modal sosial lemah, maka semangat gotong royong akan berkurang, menambah tingkat kemiskinan dan pengangguran, kriminalitas meningkat, dan menjadi sumber penghalang dalam peningkatan kesejahteraan penduduk.

Para ahli dalam mendefinisikan modal sosial dibagi menjadi dalam dua kelompok. Kelompok pertama yakni lebih menekankan pada jaringan hubungan sosial (*social network*), sedangkan kelompok kedua cenderung menekankan pada karakteristik yang melekat (*embedded*) pada diri individu yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial, pembagian ini di kemukakan oleh Jamaluddin Ancok (2003).

Definisi lain dari modal sosial di kemukakan oleh Fukuyama (1995) yakni, merupakan serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki secara bersama diantara anggota sebuah kelompok yang memungkinkan terjadinya dan terjalinnya kerjasama antar mereka. Ia mengatakan bahwa modal sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam memberi fungsi dan memperkuat kehidupan masyarakat modern.

Kepercayaan (*trust*) jadi unsur penting dalam kajian Fukuyama yang berhubungan dengan kebajikan sosial dan modal sosial. Fukuyama mengeksplorasi modal sosial guna menjelaskan bahwa masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, dijamin akan sukses menjalankan visi dan misinya (*high-trust society*).

Sebaliknya, sikap curiga, suka menaruh kecewa kepada unit masyarakat yang lain, dan selalu cemburu satu sama lain merupakan indikasi rendahnya kepercayaan. Dalam kata lain, apabila seseorang yang terpilih dalam pemilihan umum tidak didasari oleh modal

sosial berupa kepercayaan yang tinggi, maka kedepannya akan sulit menjalankan misi politik sehari-hari.

Secara umum Modal sosial dapat digambarkan dengan dukungan figur kandidat karena ketokohan sehingga adanya kepercayaan dari masyarakat menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan yang mendukung.

### **3. Modal Budaya**

Penggunaan istilah modal budaya ini pertama kali di kemukakan oleh Pierre Bourdieu dan Jean-Claude Passeron dalam “*Cultural Reproduction* dan *Social Reproduction* (1973). Modal budaya merupakan sebuah konsep sosiologi yang mendapatkan popularitas tinggi sejak konsep ini di kemukakan oleh Pierre Bourdieu.

Menurutnya modal budaya merujuk kepada aset bukan fiskal yang melibatkan ilmu pendidikan, sosial dan intelektual. Modal budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Modal budaya juga merupakan pengetahuan atau

selera yang memiliki nilai secara budaya dan pola-pola konsumsi. Modal ini juga menjadi penentu kedudukan sosial seseorang, dimana cita rasa ditentukan secara sosial.

Modal budaya merupakan dimensi yang lebih luas dari habitus. Individu memperoleh modal ini sejak ia kecil dimana modal ini sudah terbentuk dan terinternalisasi secara sendiri, salah satunya melalui ajaran orang tuanya dan pengaruh lingkungan keluarganya. Dapat dikatakan bahwa modal budaya ini dibentuk sendiri oleh lingkungan sosial yang beranekaragam serta pendidikan yang diperoleh individu tersebut, pendidikan tersebut bisa berupa pendidikan formal maupun warisan budaya dari keluarga.

Individu tersebut dapat memahami tentang modal budaya secara tidak sadar, karena dengan cara itulah kondisi ini akan berfungsi secara optimal. Modal budaya terdiri dari beberapa dimensi, dimensi tersebut antara lain ialah :

- Pengetahuan obyektif tentang seni dan budaya
- Cita rasa budaya (*cultural taste*) dan preferensi
- Kualifikasi formal (seperti gelar yang di dapat dari univeristas)
- Kemampuan budayawi dan pengetahuan praktis
- Kemampuan untuk membuat perbedaan antara yang baik maupun yang buruk, serta kemampuan untuk dibedakan.

Modal budaya memberikan kemungkinan bagi kita untuk memperoleh kesempatan dalam hidup, karena modal budaya menghasilkan kesetaraan maupun ketidaksetaraan yang akan terus memotivasi manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kelas sosial tertentu. Modal sendiri dapat di peroleh jika individu memiliki habitus yang sesuai dalam hidupnya.

Dalam kebudayaan masyarakat Indonesia, hasil pemikiran Bourdieu memberikan manfaat secara signifikan dalam upaya memahami dan menganalisis kesenjangan sosial-budaya ekonomi, dan politik yang

terjadi di masyarakat, karena modal budaya dan habitus dapat membantu memberi pencerahan terhadap bentuk dan struktur budaya.

Kondisi ini sesuai dengan masyarakat di Indonesia yang sangat mengenal apa yang dinamakan kelas sosial, dimana individu yang memiliki status sosial lebih tinggi jauh lebih dihormati dan dikenal dari pada individu yang memiliki status sosial biasa maupun rendah.

#### **4. Modal Ekonomi**

Dalam pelaksanaan pemilukada setiap pasangan maupun koalisi partai politik pasti mempersiapkan modalitas ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit, karena berkaitan dengan pembiayaan yang besar atau berdasarkan penggunaan atas dana politik tersebut.

Definisi dari modal politik diawali dari adanya pemahaman terhadap barang atau benda yang memiliki nilai ekonomis yang disebut sebagai uang/mata uang. Kalau dilihat dari segi ekonomi, modal bisa berupa hasil investasi yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain

atau pihak lain, kemudian ditukarkan dengan keuntungan baik berupa barang atau uang/jasa politik.

Modal ekonomi memiliki peranan yang sangat penting sebagai roda penggerak dan memperlancar mesin politik yang digunakan. Dalam musim pemilihan umum, dana yang dibutuhkan pada umumnya berada dalam angka yang besar. Uang tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan kampanye seperti mencetak baliho, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi syarat utama saat calon tersebut bukan berasal dari partai politik yang dicalonkannya.

Pakar ekonomi telah lama membahas tentang modal (*capital*), kajian lebih khusus berada pada modal ekonomi atau finansial (*financial capital*). Modal ekonomi atau finansial merupakan sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat produksi perusahaan (misalnya pabrik, alat kantor, maupun

kendaraan) atau uang yang dapat disimpan untuk investasi masa depan.

Konsep modal seperti ini cenderung mudah dipahami oleh orang awam, kegiatan membelanjakan atau menginvestasikan uang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat dengan pemikiran yang jelas. Dengan kata lain modal finansial atau ekonomi mudah untuk diukur, karena jumlah uang yang dibelanjakan dapat diidentifikasi dengan barang yang dibeli.

Modal politik dan modal ekonomi saling berkaitan dalam kegiatan politik yang menekankan kepada interaksi spontan yang terjadi antara pemilih dan calon politik. Waktu yang relatif pendek dalam sosialisasi diri pasangan calon, lebih mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai jalan pintas.

Kondisi seperti ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang masih dalam tahapan transisi menuju pemilu rasional dan penciptaan pemilih rasional. Pilihan publik dalam sebuah pemilihan umum pada perspektif

politik dan ekonomi merupakan proses dimana keputusan individu dikombinasikan kedalam keputusan kolektif.

Pasangan calon membutuhkan dukungan dari segi ekonomi, selain dari dana kandidat pribadi juga dana bisa berasal dari aktor-aktor ekonomi yang membiayai semua kegiatan politik kandidat dengan tujuan memenangkan pilkada. Sahdan dan Haboddin (2009:120-121) menyatakan bahwa proses politik pilkada membutuhkan biaya/ongkos yang sangat mahal.

Kondisi ini menyebabkan tantangan bagi pengembangan demokrasi dalam sektor lokal, dimana kandidat yang bertarung merupakan para pemilik modal/uang yang besar. Tingginya biaya yang dikeluarkan saat pilkada disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yakni :

- Pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung diwajibkan membeli partai politik sebagai kendaraan politik. Partai politik yang akan dijadikan kendaraan dalam pilkada mewajibkan pasangan

calon untuk membayar dana sumbangan dalam jumlah besar

- Model kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon membutuhkan banyak biaya untuk pembuatan poster, pemasangan iklan di media massa, baik di media cetak maupun media elektronik.
- Adanya praktek politik uang di setiap proses pentahapan pemilukada, guna mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada seorang pasangan calon. Praktek uang ini biasanya terlihat sangat menonjol saat kampanye berlangsung dan menjelang pemungutan suara.

Sahdan dan Haboddin (2009) menambahkan bahwa setiap proses penyelenggaraan pilkada membutuhkan “dana politik” untuk memenuhi biaya dari kegiatan tersebut. Istilah dana politik ini dapat dibedakan berdasarkan sumber dana dan penggunaan, yaitu :

- a. **Dari sumbernya**, dana ini bersumber dari sumbangan pasangan calon, sumbangan dari

simpatisan (donatur) baik secara perseorangan maupun perusahaan.

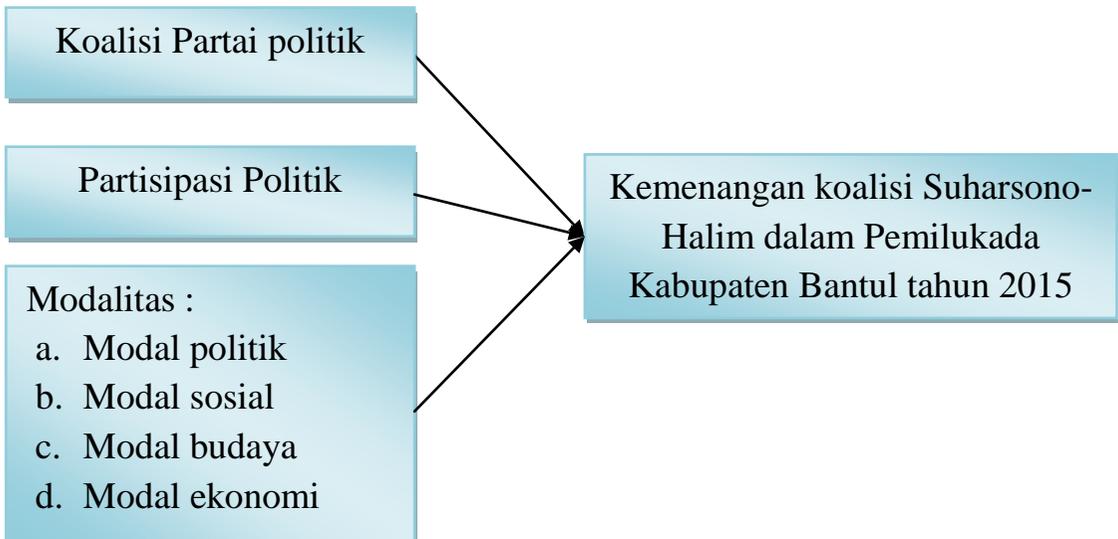
- b. **Dari sisi pengguna,** dana digunakan untuk membiayai aktivitas rutin partai politik dan pengeluaran kampanye. Dalam konteks pilkada, penggunaan dana politik tidak hanya untuk pengeluaran kampanye seperti pencetakan brosur, konvoi, biaya transport, konsumsi, cetak kaos, poster dan iklan. Melainkan juga untuk membayar partai politik yang akan dijadikan kendaraan politik, dan membeli suara masyarakat.

Hal inilah yang mendasari mengapa dana politik yang digunakan sangat mahal, karena pelaksanaan pilkada sejak persiapan, kampanye, hingga proses pemungutan suara serta pemberian dana politik lainnya membutuhkan uang. Besarnya modalitas kandidat terkadang menjadi alasan sebuah partai politik bersedia mengukung pasangan calon tersebut dan mengambil keuntungan dari kekuatan mobilitas kandidat

Secara garis besar modal ekonomi dapat dirangkum secara singkat, yakni dukungan ekonomi berupa dana politik baik bersumber dari dana pribadi maupun donator. Sedangkan berdasarkan penggunaannya, dana politik umumnya digunakan untuk membayar partai politik pengusung, untuk pelaksanaan kampanye dan untuk pembelian suara kepada masyarakat, semuanya dilaksanakan dalam upaya pemenangan pilkada.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1. Kerangka Pikir Teoritis**



## 2.4. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu pemikiran umum yang berusaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Definisi konsepsional juga merupakan penggambaran hubungan konsep-konsep khusus yang akan menentukan variabel-variabel yang akan saling berhubungan. Maka definisi konsepsional dari masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut :

1. Koalisi partai politik merupakan gabungan antara dua partai atau lebih yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama untuk membentuk suatu pemerintahan yang kuat. Hakikat dari sebuah koalisi ialah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (*strong*), mandiri (*autonomus*) dan tahan lama (*durable*).
2. Partisipasi Politik merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam proses mempengaruhi sebuah keputusan atau kebijakan

dalam sebuah pemerintahan. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi.

3. Modalitas merupakan sumberdaya dasar yang dimiliki oleh pasangan calon untuk memenangkan pemilu kepala daerah, modal tersebut dibagi menjadi tiga bagian yakni modal politik, modal sosial, modal budaya dan modal ekonomi

## **2.5. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Melalui definisi operasional akan ditentukan gejala atau indikator variabel dan bagaimana mengukur gejala atau indikator tersebut. Adapun definisi operasional yang digunakan oleh peneliti ialah :

1. Koalisi Partai Politik
  - Bentuk Koalisi yang Dibangun
2. Partisipasi Politik
  - Tingkat Partisipasi Pemilih
3. Modalitas
  - Modal Politik
  - Modal Sosial
  - Modal Budaya
  - Modal ekonomi

**Tabel 2.2. Matriks Definisi Operasional**

No	Variabel	Dimensi	Indikator
1	Faktor yang mempengaruhi	1. Koalisi partai politik	1. Koalisi Kemenangan Minimal
		2. Partipasi Politik	1. Tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari perbandingan pilkada sebelumnya dan perbandingan antara kabupaten
		3. Modalitas	2. Modal yang digunakan
		a. Modal Politik	a. Partai Politik, Jaringan, Isu politik
		b. Modal Sosial	b. Kondisi sosial masyarakat,
		c. Modal Budaya	c. Pengaruh Budaya, gelar dan jabatan
		d. Modal Ekonomi	d. Sumber dana politik, alokasi dana